

OPTIMALISASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SESUAI STANDAR  
NASIONAL PENDIDIKAN DI SMPN 12 BANDUNG

Keisha Azahra Fauzita<sup>1</sup>, Delisa Hafidah<sup>2</sup>, Fitriyani Dwi Azzahra<sup>3</sup>, Muhammad Hafizd Fauzi<sup>4</sup>  
<sup>1234</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

[keishazahraf@upi.edu](mailto:keishazahraf@upi.edu)<sup>1</sup>, [delisahaa@upi.edu](mailto:delisahaa@upi.edu)<sup>2</sup>, [fitriyaniazahraa@upi.edu](mailto:fitriyaniazahraa@upi.edu)<sup>3</sup>, [mhafizfa.15@upi.edu](mailto:mhafizfa.15@upi.edu)<sup>4</sup>

**Abstract.** *This study aims to analyze the compliance of educational facilities and infrastructure at SMPN 12 Bandung with the National Education Standards (SNP). The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observations, interviews, and document analysis. Primary data was obtained through face-to-face interviews with the Principal in charge of Facilities and Infrastructure, while secondary data included supporting documents. The analysis revealed that several facilities, such as the principal's office (75%), classrooms (72.05%), and the sports field (34.47%), do not meet the SNP's area standards, impacting comfort and the effectiveness of learning activities. However, other facilities, such as the counseling room (355.55%) and the prayer room (1,666.67%), exceed the minimum standards, offering potential for additional service development. These findings highlight the need for renovations, spatial optimization, and strategic planning to enhance the quality of the learning environment and address the needs of both students and teachers. This study provides insights into the challenges and opportunities in managing school facilities and infrastructure, emphasizing the importance of adhering to educational standards to create an optimal learning environment.*

**Keywords:** *Facilities and infrastructure, National Education Standards, learning effectiveness.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan di SMPN 12 Bandung berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Data primer diperoleh melalui wawancara tatap muka dengan Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana, sedangkan data sekunder berupa dokumen pendukung lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa fasilitas, seperti ruang kepala sekolah (75%), ruang kelas (72,05%), dan lapangan olahraga (34,47%), belum memenuhi standar luas yang ditetapkan SNP, sehingga berdampak pada kenyamanan

**Article History**

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : Sindoro**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

dan efektivitas kegiatan pembelajaran. Namun, beberapa fasilitas lain seperti ruang konseling (355,55%) dan mushala (1.666,67%) melampaui standar minimum, memberikan potensi untuk pengembangan layanan tambahan. Temuan ini menunjukkan perlunya renovasi, optimalisasi tata ruang, dan perencanaan strategis untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar dan mendukung kebutuhan siswa dan guru. Penelitian ini memberikan gambaran tentang tantangan dan peluang dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana sekolah, serta pentingnya perencanaan strategis dalam pengelolaan fasilitas pendidikan yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Sarana dan prasarana, Standar Nasional Pendidikan, efektivitas pembelajaran

## LATAR BELAKANG

Pendidikan berkualitas adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang untuk membekali individu dengan kemampuan kognitif yang memadai guna mengatasi beragam tantangan baik dalam konteks personal maupun sosial (Bararah, 2020). Dalam pendidikan, tidak sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan lebih menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk mengolah serta mengintegrasikan berbagai informasi. Hal ini sejalan dengan aspirasi nasional untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan tatanan pendidikan yang berkualitas, pemerintah telah menginisiasi beragam program transformatif, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana yang memadai hingga peningkatan kompetensi pendidik di antaranya meliputi revitalisasi kurikulum agar sejalan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembenahan sistem sertifikasi dan pengembangan profesionalisme guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran (Sriwahyuni et al., 2019). Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan finansial yang lebih baik bagi para pendidik guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan pemerintah juga telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pendidikan dengan harapan agar tujuan proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan (Luthfia et al., 2023).

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi dalam proses keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan sekolah. Menurut Hasnadi (2021) Sumber daya pendidikan yang beragam, baik berupa manusia maupun lainnya, memerlukan pengelolaan yang profesional untuk dapat dioptimalkan. Maka dengan hal tersebut akan sejalan dengan konsep pengelolaan yang baik yaitu mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan yang bertujuan mencapai tujuan pendidikan secara optimal.

Pengelolaan sumberdaya pendidikan secara profesional dilakukan bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dan ini telah ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003, bahwa tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan sekolah. Menurut Asrol et al. (2022) Di antara tanggung jawab pemerintah dalam menyukseskan pendidikan yang berkualitas ialah dengan menaikkan persentase anggaran belanja negara untuk pendidikan secara nasional maupun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). seperti adanya dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Ainayah & Husnaini (2019) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan alokasi anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk membiayai kegiatan operasional non-personalia pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Selain mendukung pelaksanaan program wajib belajar, dana BOS juga dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pengelolaan dana BOS diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022.

Dana BOS yang diberikan pemerintah bertujuan untuk membiayai kebutuhan sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Nurhayati et al. (2024) Setiap sekolah menerima dana BOS sesuai dengan kebutuhannya dan wajib mempertanggungjawabkan penggunaannya. Laporan penggunaan dana BOS harus diserahkan ke Dinas Pendidikan dan dicatat secara detail.

Keberhasilan proses belajar-mengajar tidak hanya ditentukan oleh guru dan siswa, tetapi juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai di sekolah sangatlah krusial (Alawiyah, 2017). Fasilitas yang lengkap akan mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang berkualitas dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik guru maupun murid yang berada di SMPN 12 Bandung yang terletak di Jl. Dr. Setiabudhi, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat.

Koordinasi yang terorganisir antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu memastikan tidak terputusnya komunikasi antara keduanya. Koordinasi ini memungkinkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Di sisi lain, SMPN 12 Bandung selalu berusaha memenuhi kekurangan sarana dan prasarana dengan mengajukan proposal ke pemerintah dan pihak terkait untuk mendapatkan bantuan dana atau bantuan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan baik, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka dengan adanya hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengkaji penerapan manajemen sarana dan prasarana yang sesuai SNP (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, 2007) di SMPN 12 Bandung.

## METODE PENELITIAN

Metode digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Strauss & Corbin (2003) dalam Fadli (2021) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggali makna dan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena. Peneliti secara langsung terlibat dalam pengumpulan data di lapangan dan berperan sebagai instrumen utama dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif, seperti kata-kata, tindakan,

dan interaksi sosial. Perolehan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Observasi dilakukan di SMPN 12 Bandung, Peneliti mengamati secara langsung keadaan sekolah. Observasi ini dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2024 dan berlangsung sekitar 45 menit dengan Bapak Hariyadi. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, Peneliti terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka dan terstruktur antara peneliti dan partisipan, yang dalam kasus ini adalah Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana SMPN 12 Bandung. Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan data berupa catatan dan dokumen pendukung lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti.

Data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama yaitu data primer yang didapatkan melalui interaksi langsung dengan partisipan seperti wawancara dan data sekunder yang berupa dokumen tertulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

#### 3.1.1 Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Bapak Hariyadi, memberikan gambaran mengenai proses pengadaan sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung. Menurut beliau, pengadaan sarana dan prasarana di sekolah umumnya berasal dari bantuan pemerintah. Pengadaan ini dilakukan berdasarkan laporan kebutuhan yang disampaikan oleh pihak sekolah kepada dinas pendidikan.

Sekolah secara berkala melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk perbaikan barang-barang yang rusak seperti bangku, kursi, dan fasilitas pendukung lainnya. Laporan ini dibuat setiap semester dan diserahkan kepada dinas pendidikan, yang kemudian menindaklanjuti dengan pengadaan sarana yang diperlukan. Tidak semua kebutuhan yang diajukan oleh sekolah dapat dipenuhi secara penuh, karena keterbatasan anggaran. Sekolah hanya menerima sebagian dari permintaan yang dianggap paling mendesak.

Salah satu contoh pengadaan yang disebutkan adalah fasilitas seperti *infocus* yang sudah tersedia di hampir setiap kelas. Namun, untuk perangkat teknologi yang lebih canggih seperti *smart board*, SMPN 12 Bandung baru memiliki beberapa unit yang ditempatkan di beberapa kelas dan ruang guru. Selain itu, dalam beberapa kasus, sekolah juga melibatkan orang tua untuk membantu pengadaan sarana yang mendesak, seperti pembangunan toilet untuk siswa putri. Orang tua dilibatkan melalui rapat atau pemberitahuan resmi, dan dalam kasus ini, seluruh biaya pembangunan toilet putri ditanggung oleh orang tua siswa.

Kemudian dalam hal kegiatan ekstrakurikuler, SMPN 12 Bandung memberikan otonomi kepada pembina ekstrakurikuler untuk mengelola kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Setiap ekstrakurikuler, seperti pramuka dan olahraga, dapat mengajukan kebutuhan peralatan yang mendukung kegiatan mereka. Namun, anggaran yang tersedia dari dana BOS untuk pengadaan alat ekstrakurikuler terbatas, sehingga sekolah mengandalkan partisipasi orang tua dalam pengadaan alat-alat tersebut.

Misalnya, dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler, seperti pembuatan alat peraga atau perlengkapan kegiatan, orang tua siswa berkontribusi dalam pengadaan yang diperlukan. Pengadaan sarana untuk ekstrakurikuler ini penting karena mendukung pengembangan keterampilan dan minat siswa di luar kegiatan akademik.

Pengadaan sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung dilakukan melalui proses perencanaan yang matang berdasarkan prioritas kebutuhan sekolah. Meski demikian, terbatasnya anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) menyebabkan sekolah harus mengandalkan laporan kepada dinas pendidikan atau bantuan dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

### 3.1.2 Pembahasan

Proses pengadaan sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang diidentifikasi melalui inventarisasi rutin. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar manajemen sarana dan prasarana, di mana pengadaan harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan kebutuhan nyata yang telah diidentifikasi melalui survei atau evaluasi. Menurut Sutisna (2019) perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan memerlukan analisis yang mendalam terhadap kondisi yang ada serta proyeksi kebutuhan di masa depan.

Berdasarkan wawancara, pengadaan di SMPN 12 dilakukan melalui proses pelaporan rutin kepada dinas pendidikan setiap semester. Laporan ini mencakup sarana yang rusak atau kurang memadai, seperti bangku, kursi, dan fasilitas teknologi. Proses ini mencerminkan pendekatan *top-down* dalam pengadaan, di mana pihak sekolah mengusulkan kebutuhan dan dinas pendidikan yang menentukan prioritas pengadaan. Namun, keterbatasan anggaran membuat tidak semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi secara penuh. Hanya barang-barang yang dianggap mendesak yang akan diadakan oleh pemerintah, yang dalam beberapa kasus kurang dari 100% kebutuhan yang dilaporkan terpenuhi.

Keterbatasan anggaran ini merupakan salah satu tantangan utama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan, seperti yang diidentifikasi oleh Gunawan (2020) yang menyebutkan bahwa manajemen pengadaan sering kali terganggu oleh keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hal ini, sekolah perlu melakukan skala prioritas dalam pengajuan sarana dan prasarana yang paling mendesak, seperti yang dilakukan SMPN 12 Bandung. Prioritas diberikan pada sarana yang secara langsung mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kegiatan belajar, misalnya toilet putri yang rusak atau tidak representatif, sehingga melibatkan partisipasi orang tua untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Selain itu, pengadaan sarana berbasis teknologi di SMPN 12 Bandung, seperti *infocus* dan *smart board*, sudah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya terpenuhi. Perangkat ini mendukung pembelajaran interaktif dan inovatif yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21, di mana teknologi memiliki peran sentral dalam mendukung proses belajar mengajar. Keterbatasan jumlah unit *smart board* yang baru tersedia di beberapa kelas dan ruang guru menunjukkan bahwa ada potensi pengembangan lebih lanjut yang dapat diupayakan dalam pengadaan fasilitas berbasis teknologi ini.

Selain bergantung pada pemerintah, SMPN 12 Bandung juga menunjukkan fleksibilitas dalam pengadaan sarana melalui keterlibatan orang tua siswa. Pembangunan toilet putri yang sepenuhnya didanai oleh orang tua adalah contoh bagaimana sekolah dapat memobilisasi sumber daya eksternal untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Pendekatan ini sesuai dengan konsep *community-based management*, di mana pemangku kepentingan, termasuk orang tua, dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Dengan demikian, pengadaan sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung dilakukan melalui kombinasi pendekatan *top-down* dan partisipatif, yang mencerminkan fleksibilitas manajemen dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Namun, ada ruang untuk peningkatan dalam hal pemenuhan sarana berbasis teknologi, yang penting untuk menunjang pembelajaran di era digital saat ini.

### 3.2 Pemeliharaan dan Perawatan

#### 3.2.1 Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hariyadi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung dilakukan secara rutin dan sistematis. Sekolah memiliki tim kebersihan yang terdiri dari enam orang, yang bertugas membersihkan dan memelihara berbagai area sekolah, termasuk ruang kelas, lapangan, dan toilet. Setiap anggota tim kebersihan diberikan tanggung jawab khusus untuk area tertentu, sehingga setiap bagian sekolah terkelola dengan baik.

Pemeliharaan toilet, misalnya, dilakukan oleh anggota tim kebersihan yang telah ditugaskan secara khusus, dengan pembagian wilayah kerja yang jelas. Selain itu, pemeliharaan area lain seperti lapangan dan ruang kelas juga telah diatur dengan baik. Setiap harinya, tim kebersihan melaksanakan tugas pemeliharaan rutin untuk memastikan kebersihan dan kelayakan fasilitas. Dalam hal pemeliharaan peralatan elektronik, seperti infocus dan laptop, guru yang meminjam peralatan tersebut diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kondisi barang yang dipinjam. Jika terjadi kerusakan, guru diharuskan memperbaikinya sendiri sebelum mengembalikannya ke sekolah. Untuk perbaikan fasilitas lain yang sifatnya ringan, seperti bangku yang rusak, sekolah biasanya menangani secara mandiri dengan memanfaatkan tenaga dari penjaga sekolah yang memiliki keterampilan memperbaiki peralatan, seperti melakukan pengelasan.

Bapak Hariyadi juga menjelaskan bahwa pemeliharaan preventif dilakukan dengan menyisihkan sebagian dana BOS untuk perawatan sarana dan prasarana, khususnya untuk barang-barang elektronik dan perabotan yang sering digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, ada tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan kerusakan fasilitas yang sering disebabkan oleh siswa, seperti pintu toilet yang cepat rusak atau kursi yang tidak bertahan lama akibat penggunaan yang tidak hati-hati oleh siswa.

Dengan sistem yang telah diterapkan, pemeliharaan sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung berjalan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan harian sekolah. Namun, masalah-masalah yang terkait dengan penggunaan oleh siswa menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga kualitas fasilitas sekolah.

#### 3.2.2 Pembahasan

Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana merupakan aspek penting dalam manajemen fasilitas pendidikan. Di SMPN 12 Bandung, pemeliharaan dilakukan secara rutin oleh tim kebersihan yang telah diberikan tanggung jawab untuk masing-masing area sekolah. Pemeliharaan ini termasuk dalam kategori pemeliharaan preventif, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga agar sarana dan prasarana tetap dapat digunakan secara optimal

Menurut Sudrajat (2019) pemeliharaan preventif adalah strategi yang paling efektif dalam menjaga kelayakan fasilitas pendidikan. Pemeliharaan ini mencakup kegiatan rutin seperti pembersihan dan pemeriksaan kondisi fasilitas untuk mendeteksi masalah lebih awal sebelum menjadi lebih serius. Hal ini sejalan dengan praktik yang dilakukan di SMPN 12, di mana setiap hari tim kebersihan memastikan kebersihan dan kelayakan penggunaan fasilitas seperti toilet, ruang kelas, dan lapangan. Selain itu, perbaikan fasilitas yang rusak juga dilakukan secara mandiri oleh sekolah, terutama untuk kerusakan ringan seperti kursi yang rusak. Dalam hal ini, sekolah memanfaatkan keterampilan staf sekolah untuk memperbaiki peralatan yang rusak, yang menunjukkan upaya sekolah dalam menjaga efisiensi dan menghemat anggaran. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip manajemen sumber daya yang menekankan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan tenaga kerja untuk memelihara fasilitas sekolah.

Namun, tantangan utama yang dihadapi SMPN 12 Bandung adalah kerusakan yang sering terjadi akibat penggunaan yang tidak hati-hati oleh siswa. Fasilitas seperti pintu toilet dan kursi sering kali cepat rusak karena tidak digunakan dengan baik oleh siswa. Hal ini menjadi masalah yang umum di banyak sekolah, di mana kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya menjaga fasilitas sekolah berdampak negatif pada umur pakai sarana. Menurut Nawawi (2018) masalah perilaku siswa dalam penggunaan fasilitas dapat diminimalisir melalui pendidikan karakter yang menanamkan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah dan fasilitas yang ada.

Strategi lain yang digunakan di SMPN 12 adalah pengalokasian sebagian dana BOS untuk pemeliharaan barang-barang elektronik, seperti infocus dan laptop. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dalam pengelolaan fasilitas sekolah, di mana anggaran pemeliharaan harus dialokasikan secara khusus untuk barang-barang yang memerlukan perawatan berkala. Penggunaan dana BOS untuk pemeliharaan ini juga membantu sekolah menjaga kelayakan sarana yang mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi, yang semakin relevan dalam era digital saat ini.

Secara keseluruhan, pemeliharaan dan perawatan di SMPN 12 Bandung sudah berjalan secara sistematis dan preventif. Meski demikian, tantangan terkait perilaku siswa dan keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan dalam menjaga fasilitas agar tetap optimal. Upaya yang lebih besar dalam edukasi siswa mengenai pentingnya menjaga fasilitas sekolah serta optimalisasi alokasi anggaran pemeliharaan dapat menjadi solusi untuk memperpanjang umur pakai sarana dan prasarana di sekolah.

### 3.3 Pengawasan dan Pengendalian

#### 3.3.1 Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hariyadi, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung dilaksanakan secara terstruktur. Salah satu

mekanisme utama pengawasan yang diterapkan adalah melalui sistem inventarisasi. Setiap sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, baik yang baru maupun lama, dicatat secara detail. Proses pencatatan ini mencakup informasi mengenai kondisi, jenis, dan lokasi barang. Inventarisasi ini juga dilakukan ketika ada barang yang rusak, dan barang yang sudah tidak layak pakai akan didokumentasikan dan dilaporkan ke dinas pendidikan untuk diganti.

Untuk barang-barang yang dipinjamkan kepada guru, seperti laptop dan infocus, terdapat catatan khusus yang mencatat tipe barang, siapa yang meminjam, serta kapan barang tersebut dipinjam. Catatan ini digunakan untuk mengontrol penggunaan barang agar ketika ada pengawasan dari dinas atau *monitoring* eksternal, sekolah dapat menunjukkan data penggunaan sarana secara akurat.

Selain itu, sekolah juga melibatkan wali kelas dan guru untuk memonitor fasilitas di kelas masing-masing. Wali kelas diharuskan melaporkan jika ada fasilitas yang rusak atau memerlukan perbaikan kepada pihak manajemen sarana dan prasarana. Laporan ini kemudian digunakan oleh Bapak Hariyadi dan tim untuk mengambil tindakan perbaikan atau pemeliharaan. Dalam hal penyalahgunaan atau kerusakan sarana yang diakibatkan oleh pengguna, Bapak Hariyadi menjelaskan bahwa sekolah tidak menerapkan sanksi tegas, tetapi lebih memilih pendekatan kompromi. Jika ada barang yang rusak, seperti laptop atau peralatan lain, guru atau pengguna akan diminta untuk memperbaikinya sendiri, dengan tujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari beban finansial yang besar, terutama jika barang yang rusak memiliki nilai yang tinggi.

Pengawasan dari pihak eksternal seperti dinas pendidikan dan Kemendikbud juga dilakukan secara berkala. Mereka datang untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk sarana yang diperlukan sekolah, berdasarkan hasil *monitoring* ini. Namun, pengawasan dari pihak dinas tidak selalu rutin, tetapi dilakukan berdasarkan urgensi dan kebutuhan yang disampaikan oleh sekolah. Secara umum, SMPN 12 Bandung telah menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang baik, terutama melalui pencatatan inventaris yang ketat dan pelibatan guru serta wali kelas dalam memonitor kondisi fasilitas di masing-masing ruang kelas.

### 3.3.2 Pembahasan

Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Dalam wawancara, Bapak Hariyadi menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui sistem inventarisasi yang mencakup pencatatan detail tentang setiap barang, termasuk kondisi, jenis, dan lokasi. Proses ini sejalan dengan konsep manajemen pengelolaan sarana dan prasarana yang menekankan pentingnya inventarisasi dalam menjaga keberfungsian fasilitas pendidikan.

Menurut Ishak et al. (2023) inventarisasi yang baik merupakan langkah awal yang krusial dalam manajemen fasilitas, karena dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan pengadaan baru. Dengan mencatat setiap barang secara teratur, sekolah tidak hanya memastikan transparansi dalam penggunaan sarana, tetapi juga dapat

menunjukkan data yang akurat saat dilakukan *monitoring* oleh pihak dinas pendidikan atau pemangku kepentingan lainnya.

Pelibatan wali kelas dan guru dalam pengawasan fasilitas juga merupakan strategi yang efektif. Wali kelas bertanggung jawab untuk melaporkan kondisi fasilitas di kelas mereka, yang memungkinkan manajemen untuk segera mengambil tindakan jika ada kerusakan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Annur et al. (2024) yang menunjukkan bahwa keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengawasan sarana dan prasarana sekolah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas. Dengan melibatkan wali kelas, sekolah memperoleh laporan yang lebih akurat dan dapat memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara para guru dan siswa terhadap fasilitas yang digunakan.

Dalam menghadapi masalah penyalahgunaan atau kerusakan sarana yang diakibatkan oleh pengguna, Bapak Hariyadi menjelaskan bahwa sekolah tidak menerapkan sanksi tegas, tetapi lebih memilih pendekatan kompromi. Dengan pendekatan ini, sekolah menciptakan suasana yang lebih mendukung bagi guru dan siswa, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab tanpa menimbulkan tekanan berlebihan. Menurut Ishak et al. (2023) pendekatan berbasis dialog dan partisipasi lebih efektif dalam membangun lingkungan belajar yang positif, dan ini terlihat dalam praktik pengawasan yang dilakukan di SMPN 12 Bandung.

Pengawasan dari pihak eksternal, seperti dinas pendidikan dan Kemendikbud, juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung memenuhi standar yang ditetapkan. *Monitoring* berkala oleh dinas pendidikan memberikan umpan balik mengenai kondisi fasilitas, dan juga membuka kesempatan bagi pemerintah untuk berkontribusi dalam penyediaan sarana yang diperlukan sekolah. Secara keseluruhan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung telah dilakukan dengan baik. Dengan sistem inventarisasi yang ketat, keterlibatan guru, serta pendekatan yang mendukung, sekolah dapat memastikan bahwa fasilitas pendidikan dapat mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal.

### 3.4 Evaluasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

#### 3.4.1 Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Hariyadi menjelaskan bahwa evaluasi sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas penggunaan fasilitas yang ada. Sekolah melakukan pendataan terhadap sarana dan prasarana yang masih terpakai dan yang sudah tidak terpakai. Informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan mengenai perbaikan, penggantian, atau penghapusan fasilitas yang sudah tidak layak.

Proses evaluasi ini juga melibatkan laporan dari wali kelas dan guru mengenai kondisi fasilitas yang ada di kelas mereka. Jika ditemukan sarana yang rusak atau tidak berfungsi, laporan ini akan diajukan kepada pihak manajemen untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini, SMPN 12 Bandung menerapkan sistem pengelolaan yang bersifat partisipatif, di mana semua pemangku kepentingan diundang untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap kondisi sarana dan prasarana.

Bapak Hariyadi juga menyebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan dalam evaluasi sarana dan prasarana adalah kemampuan sekolah untuk melaksanakan kegiatan yang membutuhkan fasilitas tertentu, seperti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). SMPN 12 Bandung berhasil melaksanakan UNBK dengan baik, yang menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada cukup memadai untuk mendukung kegiatan tersebut. Namun, sekolah juga mendapatkan masukan dari dinas pendidikan mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan koneksi Wi-Fi yang dianggap masih kurang optimal. Selain itu, Bapak Hariyadi menjelaskan bahwa evaluasi juga mencakup pengumpulan aspirasi dari orang tua dan siswa. Setiap kelas memiliki perwakilan orang tua (korlas) yang berfungsi untuk menampung masukan dan keluhan dari orang tua mengenai sarana dan prasarana di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa SMPN 12 Bandung mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dan pengembangan sarana dan prasarana.

Untuk pengembangan sarana dan prasarana, sekolah mengusulkan kebutuhan yang telah dievaluasi ke dinas pendidikan melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pengajuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sarana yang ada, serta masukan dari wali kelas dan guru. Dalam hal ini, SMPN 12 Bandung memiliki sistem yang cukup baik dalam merencanakan dan mengajukan pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan hasil evaluasi yang ada. Secara keseluruhan, evaluasi dan pengembangan sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memanfaatkan laporan dari guru serta wali kelas untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kebutuhan dan kondisi fasilitas di sekolah.

### 3.4.2 Pembahasan

Evaluasi dan pengembangan sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat mendukung proses pembelajaran dengan baik. Bapak Hariyadi menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan melalui pendataan berkala terhadap sarana dan prasarana yang ada, baik yang masih terpakai maupun yang sudah tidak layak digunakan. Hal ini penting dalam konteks manajemen sarana dan prasarana, di mana evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan pengembangan.

Menurut Khikmah (2020) manajemen sarana dan prasarana yang baik berperan penting dalam mengembangkan mutu pendidikan. Evaluasi yang dilakukan di SMPN 12 Bandung mencakup pengumpulan informasi dari berbagai pihak, termasuk wali kelas dan guru, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi fasilitas. Pendekatan ini mencerminkan prinsip manajemen partisipatif, di mana semua pemangku kepentingan diajak untuk terlibat dalam proses evaluasi, sehingga hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan akurat.

Salah satu indikator keberhasilan evaluasi di SMPN 12 Bandung adalah kemampuan sekolah dalam melaksanakan kegiatan UNBK. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada cukup memadai untuk mendukung kegiatan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri & Syahrani (2022) yang menyatakan bahwa pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang efektif dapat langsung memengaruhi kualitas proses belajar mengajar. Dengan demikian,

evaluasi yang baik tidak hanya membantu dalam identifikasi masalah, tetapi juga dalam merencanakan pengembangan yang tepat guna.

Pengembangan sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung dilakukan melalui usulan yang diajukan ke dinas pendidikan dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proses ini didasarkan pada hasil evaluasi yang melibatkan masukan dari wali kelas, guru, dan bahkan orang tua siswa. Ainiyah & Husnaini (2019) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sarana pendidikan, yang dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap fasilitas yang ada. Dengan mengusulkan pengembangan berdasarkan hasil evaluasi dan partisipasi pemangku kepentingan, SMPN 12 Bandung menunjukkan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengelolaan sarana yang lebih baik.

Secara keseluruhan, proses evaluasi dan pengembangan sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung telah berjalan dengan baik, dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki sistem manajemen yang responsif terhadap kebutuhan fasilitas pendidikan, dan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengelolaan sarana yang efektif.

### 3.5. Analisis Merujuk SNP

Keterangan	Luas Sebenarnya	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Selisih (m <sup>2</sup> )	Presentase Pemenuhan (%)
Ruang Kepala Sekolah	9 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	-3 m <sup>2</sup>	75%

**Tabel 1. Analisis Prasarana Ruang Kepala sekolah**

Ruang kepala sekolah di SMPN 12 Bandung belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh SNP. Dengan luas hanya 9 m<sup>2</sup>, ruang tersebut kurang dari luas minimum yang disyaratkan sebesar 12 m<sup>2</sup>, sehingga ada kekurangan luas sebesar 3 m<sup>2</sup>. Persentase pemenuhan standar sebesar 75%, yang dihitung dari luas sebenarnya dibagi luas SNP yang ditetapkan dikali dengan seratus persen dan hasil dari perhitungan terkait luas ruang kepala sekolah di SMPN 12 Bandung tersebut menunjukkan bahwa ruang kepala sekolah ini masih di bawah standar yang ditetapkan oleh SNP. Untuk memenuhi standar, maka perlu dilakukan penambahan ruang atau renovasi agar luas ruang kepala sekolah mencapai minimal 12 m<sup>2</sup> dan lebar minimal 3 m<sup>2</sup>, sehingga dapat mendukung fungsi pengelolaan sekolah dengan baik.

Keterangan	Luas Sebenarnya per kelas	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Selisih (m <sup>2</sup> )	Presentase Pemenuhan (%)
Ruang Kelas	49 m <sup>2</sup>	68 m <sup>2</sup>	-19 m <sup>2</sup>	72,05%

**Tabel 2. Analisis Prasarana Ruang Kelas**

Ruang kelas saat ini memiliki luas 49 m<sup>2</sup> per kelas, yang tidak memenuhi luas ideal yang diperlukan sebesar 68 m<sup>2</sup> untuk jumlah peserta didik 34 orang per kelas. Terdapat kekurangan luas sebesar 19 m<sup>2</sup>, yang menunjukkan bahwa ruang kelas tidak cukup untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara optimal. Persentase pemenuhan standar sebesar 72,05% menunjukkan bahwa ruang kelas ini masih di bawah standar yang ditetapkan oleh SNP. Hal ini dapat berdampak pada kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar. Oleh karena itu, disarankan untuk mempertimbangkan penambahan ruang kelas atau pengaturan ulang jumlah peserta didik per kelas agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Keterangan	Luas Sebenarnya per kelas	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Selisih (m <sup>2</sup> )	Presentase Pemenuhan (%)
Ruang Konseling	32 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	23 m <sup>2</sup>	355,55%

**Tabel 3. Analisis Prasarana Ruang Konseling**

Ruang konseling di sekolah memiliki luas 32 m<sup>2</sup>, yang jauh melebihi luas minimum yang ditetapkan oleh SNP sebesar 9 m<sup>2</sup>. Dengan persentase pemenuhan standar mencapai 355,55%, ini menunjukkan bahwa ruang konseling tersebut sangat memadai dan dapat memberikan fasilitas yang lebih dari cukup untuk kegiatan konseling. Kelebihan luas ini memungkinkan ruang konseling untuk dilengkapi dengan berbagai fasilitas tambahan, seperti area tunggu, perabotan yang nyaman, dan ruang untuk kegiatan kelompok.

Hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan konseling yang diberikan kepada peserta didik, serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan mendukung bagi mereka yang membutuhkan bantuan psikologis atau konseling. Secara keseluruhan, ruang konseling ini memenuhi dan bahkan melampaui standar yang ditetapkan, yang merupakan hal positif bagi pengembangan layanan dukungan di sekolah.

Keterangan	Luas Sebenarnya per kelas	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Selisih (m <sup>2</sup> )	Presentase Pemenuhan (%)
Lahan	3.920 m <sup>2</sup>	5.685 m <sup>2</sup>	-1.765 m <sup>2</sup>	68,95%

**Tabel 4. Analisis Lahan Sekolah**

Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, luas lahan di SMPN 12 Bandung memiliki beberapa aspek yang perlu dianalisis. Standar menyebutkan bahwa luas minimum lahan dengan bangunan 2 lantai adalah 6,1 m<sup>2</sup> per siswa. Dengan jumlah siswa sebanyak 932 orang, maka kebutuhan luas ideal lahan adalah 5.685 m<sup>2</sup>. Namun, berdasarkan data, lahan yang tersedia hanya 3.920 m<sup>2</sup>, sehingga terdapat kekurangan sebesar 1.765 m<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa lahan yang ada hanya memenuhi sekitar 68,95% dari standar minimum yang ditetapkan. Luas ruang yang tersedia memberikan rata-rata 4,2 m<sup>2</sup> per siswa, yang jauh di bawah standar 6,1 m<sup>2</sup> per siswa. Kondisi ini dapat mempengaruhi kenyamanan siswa dalam belajar, terutama jika semua meja, kursi, dan perlengkapan lainnya sudah tidak layak pakai.

Keterangan	Luas Sebenarnya	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Selisih (m <sup>2</sup> )	Presentase Pemenuhan (%)
Jamban Guru	6 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	300%
Jamban Putra	25 m <sup>2</sup>	23,65 m <sup>2</sup>	1,35 m <sup>2</sup>	105,71%
Jamban Putri	32 m <sup>2</sup>	30,6 m <sup>2</sup>	1,4 m <sup>2</sup>	104,57%

**Tabel 5. Analisis Prasarana Jamban**

Berdasarkan data yang tersedia, SMPN 12 Bandung memiliki jamban seluas 70 m<sup>2</sup> untuk melayani kebutuhan 932 siswa dan para guru. Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007, standar minimum luas jamban untuk satuan pendidikan adalah 2 m<sup>2</sup> per orang. Dengan jumlah siswa sebanyak 932 orang dan para guru, maka luas minimal jamban yang dibutuhkan adalah 56,25 m<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan olahraga di SMPN 12 Bandung mengalami luas yang lebih sebesar 13,75 m<sup>2</sup> dari standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, peraturan juga mengatur bahwa di dalam setiap jamban tersebut harus terdapat 1 buah kloset jongkok, 1 buah tempat air, 1 buah gayung, 1 buah gantungan pakaian, serta 1 buah temoat sampah. Dengan adanya luas yang lebih maka akan membuat murid nyaman dan leluasa untuk bisa buang hajat dan akan berdampak terhadap keefektifan waktu pembelajaran juga.

Keterangan	Luas Sebenarnya	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Selisih (m <sup>2</sup> )	Presentase Pemenuhan (%)
Ruang UKS	13 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	-1 m <sup>2</sup>	108,33%

**Tabel 6. Analisis Prasarana Ruang UKS**

Menurut Permendiknas No. 24 Tahun 2007, standar minimum luas ruang TU ditetapkan sebesar 12 m<sup>2</sup>. Dengan demikian, luas ruang UKS yang SMPN 12 Bandung miliki telah melampaui standar tersebut dengan luas 13 m<sup>2</sup>. Ini merupakan kondisi yang sangat baik dan memberikan ruang yang lebih leluasa untuk aktivitas perawatan kesehatan di sekolah.

Di sisi lain, seluruh standar mengenai peralatan dan perabotan UKS SMPN 12 Bandung telah terpenuhi terutama untuk memberikan pertolongan pertama dan perawatan dasar bagi siswa yang sakit atau mengalami cedera.

Keterangan	Luas Sebenarnya	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Selisih (m <sup>2</sup> )	Presentase Pemenuhan (%)
Ruang Guru	120 m <sup>2</sup>	= 44 guru × 4 m <sup>2</sup> /guru = 176 m	56 m <sup>2</sup>	$\frac{120 \text{ m}^2}{176 \text{ m}^2} \times 100\% =$ 68,18%

**Tabel 7. Analisis Prasarana Ruang Guru**

Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, menyebutkan bahwa luas minimum ruang guru adalah 4 m<sup>2</sup> per guru. Dengan jumlah guru sebanyak 44 orang, kebutuhan luas ideal ruang guru adalah 176 m<sup>2</sup>. Namun, berdasarkan data, ruang guru yang tersedia hanya 120 m<sup>2</sup>, sehingga terdapat kekurangan sebesar 56 m<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa ruang guru yang ada hanya memenuhi sekitar 68,18% dari standar minimum yang ditetapkan. Luas ruang yang tersedia memberikan rata-rata 2,73 m<sup>2</sup> per guru, yang jauh di bawah standar 4 m<sup>2</sup> per guru. Kondisi ini dapat mempengaruhi kenyamanan guru dalam bekerja, terutama jika semua meja, kursi, dan lemari serta perlengkapan lainnya harus disediakan di ruang yang terbatas. Ketidaksesuaian ini perlu ditangani untuk mendukung efektivitas kerja dan produktivitas guru.

Keterangan	Luas Sebenarnya	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Selisih (m <sup>2</sup> )	Presentase Pemenuhan (%)
Lapangan Olahraga	1.020 m <sup>2</sup>	= 932 siswa × 3 m <sup>2</sup> /siswa = 2.796 m <sup>2</sup>	1.776 m <sup>2</sup>	$\frac{1.020 \text{ m}^2}{2.796 \text{ m}^2} \times 100\%$ = 34,47%

**Tabel 8. Analisis Prasarana Lapangan Olahraga**

Berdasarkan data yang tersedia, SMPN 12 Bandung memiliki lapangan olahraga seluas 1.020 m<sup>2</sup> untuk melayani kebutuhan 932 siswa. Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007, standar minimum luas tempat bermain atau berolahraga untuk satuan pendidikan adalah 3 m<sup>2</sup> per siswa. Dengan jumlah siswa sebanyak 932 orang, maka luas ideal lapangan yang dibutuhkan adalah 2.796 m<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan olahraga di SMPN 12 Bandung masih mengalami kekurangan luas sebesar 1.776 m<sup>2</sup>, atau hanya memenuhi 36,47% dari standar yang telah ditetapkan. Kekurangan ini cukup signifikan dan dapat berdampak pada optimalisasi kegiatan olahraga, upacara, serta aktivitas ekstrakurikuler lainnya.

Selain itu, peraturan juga mengatur bahwa di dalam luas tersebut harus terdapat ruang bebas dengan ukuran minimum 30 m × 20 m atau 600 m<sup>2</sup>. Dengan luas lapangan yang ada (1.020 m<sup>2</sup>), kebutuhan ruang bebas ini masih dapat dipenuhi. Namun, ruang sisa untuk kegiatan lain menjadi sangat terbatas. Ketentuan lain dalam peraturan menyebutkan bahwa lapangan olahraga harus memiliki permukaan yang datar, drainase yang baik, dan tidak ada hambatan

seperti saluran air atau pohon yang mengganggu aktivitas. Jika sebagian dari lapangan ini ditanami pohon untuk penghijauan, luas efektif lapangan akan semakin berkurang dan mengurangi fungsionalitasnya.

Keterangan	Luas Sebenarnya	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Selisih (m <sup>2</sup> )	Presentase Pemenuhan (%)
Ruang Tata Usaha	30 m <sup>2</sup>	= 8 petugas x 4m <sup>2</sup> /petugas = 2.796 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	$:\frac{30\text{ m}^2}{32\text{ m}^2} \times 100\% = 93,75\%$

**Tabel 8. Analisis Prasarana Ruang Tata Usaha**

Berdasarkan data yang tersedia, ruang Tata Usaha (TU) di SMPN 12 Bandung memiliki luas 30 m<sup>2</sup>, dengan jumlah petugas TU sebanyak 8 orang. Menurut Permendiknas No. 24 Tahun 2007, standar minimum luas ruang TU ditetapkan sebesar 4 m<sup>2</sup> per petugas. Dengan demikian, luas ideal yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas administrasi bagi 8 petugas adalah 32 m<sup>2</sup>. Dibandingkan dengan luas yang tersedia, terdapat kekurangan sebesar 2 m<sup>2</sup>, atau sekitar 6,25% dari total kebutuhan ruang ideal. Persentase pemenuhan standar adalah 93,75%, yang berarti ruang TU di SMPN 12 Bandung sudah mendekati standar minimum yang ditetapkan. Kondisi ruang yang hampir memenuhi standar ini menunjukkan bahwa ruang TU dapat mendukung aktivitas administrasi secara relatif baik. Namun, kekurangan 2 m<sup>2</sup> dapat berdampak kecil pada kenyamanan dan efisiensi kerja, terutama jika ruangan ini harus menampung furnitur esensial seperti meja, kursi, lemari arsip, dan peralatan elektronik. Agar ruang TU lebih optimal, perlu dilakukan pengaturan tata letak furnitur yang efisien, seperti penggunaan meja dan lemari vertikal untuk memaksimalkan penggunaan ruang. Secara keseluruhan, meskipun luas ruang TU ini sedikit kurang dari standar, ruang ini sudah cukup memadai untuk mendukung operasional administrasi dengan penyesuaian kecil pada tata letak dan peralatan.

Keterangan	Luas Sebenarnya	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Selisih (m <sup>2</sup> )	Presentase Pemenuhan (%)
Tempat Ibadah (Mushala)	200 m <sup>2</sup>	Luas Minimum : 12 m <sup>2</sup>	188 m <sup>2</sup>	$\frac{200\text{ m}^2}{312\text{ m}^2} \times 100\% = 1.666,67\%$

**Tabel 9. Analisis Prasarana Tempat Ibadah**

Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, bahwa luas minimum tempat ibadah adalah 12 m<sup>2</sup> tiap satuan pendidikan. Dengan kondisi SMPN 12 Bandung memiliki luas tempat ibadah sebesar 200 m<sup>2</sup> dan jumlah siswa 932 orang, kebutuhan luas ideal tempat ibadah dapat terpenuhi jika dilihat dari luas minimum 12 m<sup>2</sup>. Namun, tempat ibadah ini tidak cukup untuk menampung seluruh siswa dalam satu waktu. Seperti data di atas, memiliki selisih kekuarangan 188 m<sup>2</sup>. Sehingga, dapat di atasi dengan adanya pembagian (shift). Dengan kondisi tersebut maka luas masih dianggap memadai dan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), karena SNP hanya memberikan batas minimum 12 m<sup>2</sup> untuk tempat ibadah, tanpa menetapkan rasio siswa terhadap luas ruangan.

Keterangan	Luas Sebenarnya	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Selisih (m <sup>2</sup> )	Presentase Pemenuhan (%)
Ruang Organisasi Kesiswaan	95 m <sup>2</sup>	Luas Minimum : 9 m <sup>2</sup>	86 m <sup>2</sup>	$\frac{95 \text{ m}^2}{9 \text{ m}^2} \times 100\% = 1.055,56\%$

**Tabel 10. Analisis Prasarana Ruang Organisasi Kesiswaan**

Berdasarkan data yang tersedia, SMPN 12 Bandung memiliki ruang organisasi kesiswaan seluas 95 m<sup>2</sup> sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan. Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007, standar minimum luas ruang organisasi kesiswaan untuk satuan pendidikan adalah 9 m<sup>2</sup>. Dengan kondisi tersebut maka luas masih dianggap memadai dan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) jika di lihat dari luas minimum, karena SNP hanya memberikan batas minimum ruang organisasi kesiswaan 9 m<sup>2</sup>, tanpa menetapkan rasio siswa terhadap luas ruangan.

Keterangan	Luas Sebenarnya	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Selisih (m <sup>2</sup> )	Presentase Pemenuhan (%)
Perpustakaan	90 m <sup>2</sup>	= 932 siswa x 2 m <sup>2</sup> = 1.864 m <sup>2</sup>	1.774 m <sup>2</sup>	$\frac{90 \text{ m}^2}{1864 \text{ m}^2} \times 100\% = 4,83\%$

**Tabel 11 . Analisis Prasarana Perpustakaan**

Berdasarkan data yang tersedia, ruang perpustakaan di SMPN 12 Bandung memiliki luas 90 m<sup>2</sup>. Menurut Permendiknas No. 24 Tahun 2007, standar lebar minimum ruang perpustakaan ditetapkan sebesar 5 m. Kemudian, jika luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Maka luas tersebut sebesar 1.864 m<sup>2</sup>, yang di mana luas ruang perpustakaan SMPN 12 Bandung ini sebesar 90 m<sup>2</sup>. Dengan demikian, luas ideal yang dibutuhkan untuk ruang perpustakaan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) karena tidak melebihi 90 m<sup>2</sup>. Namun, apabila dilakukan pembagian kedatangan perpustakaan, tentunya perpustakaan di nilai cukup. Dan diharapkan untuk perpustakaan ini sudah memiliki jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai.

Keterangan	Luas Sebenarnya	Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Luas Ideal	Selisih	Presentase Pemenuhan (%)
Ruang Guru	120 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio : 4 m<sup>2</sup>/guru</li> <li>• Luas min : 48 m<sup>2</sup></li> </ul>	= 44 guru x 4 m <sup>2</sup> /guru = 176 m <sup>2</sup>	56 m <sup>2</sup>	$\frac{120 \text{ m}^2}{176 \text{ m}^2} \times 100\% = 68,18\%$
Lapangan Olahraga	1.020 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio : 3 m<sup>2</sup>/siswa</li> <li>• Luas min : 1.000m<sup>2</sup> (siswa &lt; 334)</li> </ul>	= 932 guru x 3 m <sup>2</sup> /siswa = 2.796 m <sup>2</sup>	1.776 m <sup>2</sup>	$\frac{1.020 \text{ m}^2}{2.796 \text{ m}^2} \times 100\% = 34,47\%$

Ruang Tata Usaha	30 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio : 4 m<sup>2</sup>/petugas</li> <li>• Luas min : 16 m<sup>2</sup></li> </ul>	$= 8 \text{ petugas} \times 4 \text{ m}^2/\text{petugas}$ $= 32 \text{ m}^2$	2 m <sup>2</sup>	$:\frac{30 \text{ m}^2}{32 \text{ m}^2} \times 100\%$ $= 93,75\%$
Tempat Ibadah (Mushala)	200 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas min : 12 m<sup>2</sup></li> </ul>	-	188 m <sup>2</sup>	$\frac{200 \text{ m}^2}{312 \text{ m}^2} \times 100\%$ $= 1.666,67\%$
Ruang Organisasi Kesiswaan	95 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas min : 9 m<sup>2</sup></li> </ul>	-	86 m <sup>2</sup>	$\frac{95 \text{ m}^2}{9 \text{ m}^2} \times 100\%$ $= 1.055,56\%$
Perpustakaan	90 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebar min : 5 m</li> </ul>	$= 932 \text{ siswa} \times 2 \text{ m}^2$ $= 1.864 \text{ m}^2$	1.774 m <sup>2</sup>	$\frac{90 \text{ m}^2}{1864 \text{ m}^2} \times 100\%$ $= 4,83\%$

Tabel 12 . Rangkuman Analisis Seluruh Prasarana

### 3.6 Diskusi Temuan Utama

Dari hasil wawancara dan pembahasan mengenai manajemen sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung, sejumlah temuan penting dapat disimpulkan. Pertama, kelebihan yang dimiliki oleh sekolah ini adalah penerapan pendekatan partisipatif dalam pengadaan, pemeliharaan, dan evaluasi sarana dan prasarana. Keterlibatan wali kelas, guru, dan orang tua siswa dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan komitmen sekolah untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, yang membantu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap fasilitas yang ada. Selain itu, sistem inventarisasi yang ketat diterapkan untuk sarana dan prasarana, memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap kondisi fasilitas dan memudahkan identifikasi kebutuhan perbaikan dan pengembangan yang tepat. Keberhasilan SMPN 12 dalam melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) juga menjadi indikator positif bahwa fasilitas yang ada memadai untuk mendukung kegiatan akademik yang penting.

Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu dicatat, terutama keterbatasan anggaran yang sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah, yang sangat bergantung pada dana BOS. Keterbatasan ini membatasi kemampuan sekolah untuk meningkatkan fasilitas yang ada. Selain itu, ketergantungan pada kontribusi orang tua dalam pengadaan sarana dan prasarana dapat menjadi kelemahan, terutama jika tidak semua orang tua mampu atau bersedia berkontribusi.

Tantangan yang dihadapi SMPN 12 Bandung termasuk kerusakan fasilitas yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak hati-hati oleh siswa, seperti toilet dan perabotan kelas, yang memerlukan perhatian khusus dalam menjaga kualitas dan daya tahan fasilitas. Monitoring yang tidak rutin dari dinas pendidikan juga menjadi tantangan, di mana sekolah mungkin merasa kurang mendapatkan dukungan yang diperlukan dari pemerintah dalam hal evaluasi berkala.

Namun, ada potensi yang dapat dioptimalkan untuk pengembangan sarana dan prasarana di sekolah ini. SMPN 12 dapat memanfaatkan potensi keterlibatan komunitas lebih lanjut dengan menyelenggarakan program-program yang melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengembangan fasilitas, seperti kegiatan bakti sosial untuk

perbaikan sarana dan prasarana. Selain itu, inovasi dalam pengadaan dan pemeliharaan, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk manajemen inventaris dan pengawasan, dapat membantu mempermudah proses pemantauan dan pelaporan. Sekolah juga dapat mengembangkan program edukasi bagi siswa tentang pentingnya menjaga dan merawat fasilitas sekolah, sehingga membangun kesadaran dan tanggung jawab di kalangan siswa untuk menjaga fasilitas yang ada. Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung menunjukkan hasil yang baik dengan beberapa kelebihan, namun masih memiliki tantangan dan kekurangan yang perlu diatasi. Melalui pengoptimalan potensi yang ada dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, SMPN 12 dapat terus meningkatkan kualitas fasilitas yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan siswa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

Pada hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di SMPN 12 Bandung sudah berjalan dengan baik, terutama melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan guru, wali kelas, dan orang tua dalam proses pengadaan, pemeliharaan, serta evaluasi. Sistem inventarisasi yang diterapkan memungkinkan sekolah memantau kondisi fasilitas secara akurat, membantu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dan pengembangan. Meskipun proses pengadaan sarana dilakukan secara berkala melalui laporan kepada dinas pendidikan, keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada dana BOS masih menjadi tantangan utama dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas. Pemeliharaan rutin dilakukan oleh tim kebersihan dan melibatkan guru dalam memonitor fasilitas, namun kerusakan akibat perilaku siswa menjadi salah satu tantangan. Evaluasi sarana dan prasarana melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua melalui perwakilan kelas, dan hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan fasilitas.

### 4.2. Saran

Rekomendasi untuk perbaikan meliputi optimalisasi anggaran dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung pengadaan fasilitas tambahan. Selain itu, diperlukan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga fasilitas sekolah agar tidak mudah rusak. Pengembangan fasilitas berbasis teknologi seperti smart board dan koneksi internet juga disarankan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih inovatif. Lebih lanjut, partisipasi orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sosial bisa diperkuat untuk membantu meringankan beban keuangan sekolah terkait perbaikan sarana dan prasarana. Monitoring berkala oleh dinas pendidikan juga perlu lebih sering dilakukan untuk memastikan kondisi fasilitas tetap terjaga dan mendapatkan umpan balik yang lebih rutin. Dengan langkah-langkah ini, SMPN 12 Bandung diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana guna mendukung proses pembelajaran secara optimal.

## DAFTAR REFERENSI

Ainiyah, Q., & Husnaini, K. (2019). Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di SMAN Bareng Jombang. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 98–112. <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v3i2.93>

- Alawiyah, F. (2017). Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(1), 81–92. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1256>
- Annur, S., Witahanriani, W., & Ibrahim, I. (2024). Perencanaan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di MTS SA Assanadiyah Palembang. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(4), 632–642. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.855>
- Asrol, L. D., Yahya, & Hadiyanto. (2022). Penerapan Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Journal Ability : Journal of Education and Social Analysis*, 3(3), 79–89.
- Bararah, I. (2020). Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal MUDARRUSUNA*, 10(2), 351–370. <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v10i2.7842>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fikri, R., & Syahrani. (2022). Strategi pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran di pondok pesantren rasyidiyah khalidiyah (Rakha) amuntai. *Educatioanl Journal: General and Specific Research*, 2(1), 79–88. <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/70>
- Gunawan, A. (2020). *Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah di Indonesia*. Alfabeta.
- Hasnadi. (2021). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. *BIDAYAH: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(2), 153–164.
- Ishak, Harahap, N., & Murtafiah, N. H. (2023). Konsep Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Proses Pembelajaran. *Journal on Education*, 5(4), 17181–17189.
- Khikmah, N. (2020). Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan. *JAMP: Jurnal Adminitrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 14–21.
- Luthfia, R. A., Amelia, D. P., Oktafianti, M., Galand, P. B. J., & Annisa, R. N. (2023). Analisis Pengelolaan Dana BOS terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29486–29490.
- Nawawi, H. (2018). *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Rajawali Pers.
- Nurhayati, N., Primarni, A., & Tholkhah, I. (2024). Implementasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pembelajaran di SD Yapis Kota Bogor. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), 70–81. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.4961>
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 (2007).
- Sriwahyuni, E., Kristiawan, M., & Wachidi, W. (2019). Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan (Snp) Pada Smk Negeri 2 Bukittinggi. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v4i1.2472>
- Sudrajat, A. (2019). *Manajemen Fasilitas Pendidikan: Teori dan Praktik*. Alfabeta.
- Sutisna, E. (2019). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Gramedia.